

## HIZBUT TAHRIR SEBAGAI GERAKAN SOSIAL (Melihat Konsep HT mengenai Negara)

**Khusnul Khotimah**

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta  
mamaclaineyahoo.com

### Abstract

This research is aimed to discuss the history and development of HT in Indonesia, the understanding on the HT's concept of state, and kind of challenges of the HT movement. Using Piötr Stzompka's theory of social movement, it seems that HT used social movement by keeping on doing critics and showing the inadequacy of system of government, at the same time it offers *khilafah Islamiyah* concept as the alternative. The research uses a qualitative phenomenological method through the method of data collection found in books, articles and interviews in magazines and websites. The article uses the interpretative type of data analysis. The study shows that HT is one of Islamic movements preserving a conservative ideology. The main agenda is bringing back Islam authority in the past and developing Islamic state led by a *Khalifah* through *bai'at*. The model of leadership in this 'dream state' is a sole leadership, while Islamic state is geographically an unlimited state. In other word, the *khalifah* is the leader of Islamic state for all around the world. This community has spread the ideology in many regions and has reached circles in different kinds of background and society. The purpose is to promote *khilafah Islamiyah* in the world. HT tends to reject secularism because they classify this concept as *kufur* that against the Islamic view. From the beginning, HT has a clear and unchanged attitude to this case. This can be seen from its consistency using books from HT's *Amir* that also be used in Indonesia.

Keywords; *HT, state, social movement*

### A. Pendahuluan

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)<sup>1</sup> merupakan kepanjangan tangan gerakan Hizbut Tahrir (HT) di Timur Tengah. Mereka mengaku sebagai partai politik ideologis yang melandaskan gerakan dan ajarannya pada Islam dan dakwahnya berpijak di atas keharusan mengembalikan *khilafah* Islamiyah dengan bertopang kepada fikrah (ide) sebagai sarana paling pokok dalam perubahan. Kelompok ini telah mengeluarkan ijtihad-

---

<sup>1</sup> Dalam bahasa Arab kata ini tertulis Hizb at-Tahrir, sedangkan dalam penulisan Indonesianya ditulis Hizbut Tahrir.

ijtihad syar'i tentang politik yang cenderung kontroversial dan mengundang pro dan kontra di tengah pergulatan wacana penegakan demokrasi di Indonesia.<sup>2</sup> Dalam ranah pusatnya, kelompok ini dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin Al-Nabhani, seorang ulama alumni al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Pemikiran-pemikiran Syaikh inilah yang menjadi landasan atau bahkan pijakan utama dalam pemikiran aktivis HT di manapun di seluruh dunia.

Dari awal berdirinya hingga tahun 2006, HT diperkirakan telah berkembang di lebih dari 25 negara. HT kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.<sup>3</sup>

Dalam memperjuangkan *khilafahnya*, HT mengklaim diri sebagai sebuah partai politik Islam ideologis, politik merupakan aktivitasnya sedangkan Islam sebagai *mabda'* (ideologinya).<sup>4</sup> Hal ini terkesan aneh, karena di Indonesia HT bukan merupakan partai politik yang secara resmi terdaftar dalam Departemen Kehakiman RI, namun terdaftar sebagai organisasi massa, sehingga di hadapan hukum, HT dianggap sebagai partai politik yang tidak sah.<sup>5</sup> Di samping karena kurangnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat parpol—misalnya harus memiliki kepengurusan paling tidak 50% dari jumlah propinsi, 50% dari jumlah kabupaten—namun juga tampaknya HT kurang tertarik untuk masuk ke dunia politik praktis.

Sejak awal berdirinya tahun 1953 di Al-Quds Palestina, organisasi ini memang memiliki cita-cita besar, yakni melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, HT berpendirian harus dilakukan melalui negara, dalam hal

---

<sup>2</sup> Zusiana E. T. & Masnun Tahir, *Terpinggirkan di Tengah Perjuangan: studi terhadap peran politik perempuan Hizbut Tahrir Indonesia*. www.ditpertaiss.net/journal. Diakses pada 14 Juli 2010.

<sup>3</sup> Deni Kodrat, "Dinamika Dakwah Hizbut Tahrir di Sejumlah Negara", dalam majalah *al-Wa'ie*, no. 55 tahun V, Maret, 2005, hlm. 75-81.

<sup>4</sup> Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan nur Khalis (Bogor: HT Press, 2002), hlm. 1.

<sup>5</sup> Awani Irewati, Dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Lipi Press, 2005), hlm. 265.

ini HT menekankan pada *Daulah Islamiyah* atau *daulah khilafah* yang dipimpin oleh seorang *khalifah* yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. *Khalifah* tersebut harus dibai'at oleh kaum muslim untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad.<sup>6</sup> Kemajuan umat Islam harus diraih dengan pencerahan dan pencerdasan, karena itu HT berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan kemuliaan seperti yang pernah terjadi di masa dulu.

Oleh karenanya, banyak kalangan yang berpendapat bahwa HT merupakan kelompok fundamental Musa Kailani yang dalam tulisannya mengartikan fundamentalisme sebagai gerakan sosial keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang fundamental dan kembali kepada kemurnian etika dengan cara mengintegrasikannya secara positif dalam doktrin agama.<sup>7</sup> Jan Hjarpe mengungkapkan bahwa fundamentalisme merupakan keyakinan kepada al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber otoritatif yang mengandung norma-norma politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan untuk menciptakan masyarakat yang baru. Leonard Binder juga menyatakan bahwa fundamentalisme adalah sebuah gerakan keagamaan yang menjunjung tinggi romantisme periode Islam awal.<sup>8</sup>

Dalam rangka mengoperasionalkan gagasan idealnya, HT menggunakan tiga tahap;<sup>9</sup> Pertama, Tahapan *Tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), yakni sebuah tahapan awal yang ditujukan untuk melahirkan orang-orang yang meyakini *fiqrah Hizbut Tahrir* dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. Kedua, Tahapan *Tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat agar mampu mengembangkan dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan. Ketiga, Tahapan *Istilamul Hukmi* (pengambil alihan kekuasaan) untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia.

---

<sup>6</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizb Tahrir Partai Politik Islam Ideologis* (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hlm. 20

<sup>7</sup> A.Maftuh Abegebriel dan Ibida Syitaba, "Fundamentalisme Islam, Akar Telogis dan Politis," dalam *Negara Tuhan: Thematic Encyclopaedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm 501.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hlm. 57.

Ketiga tahap di atas berjalan secara simultan dan gradual, artinya tahapan pertama mendekati umat dengan memberikan pemahaman Islam yang benar menurut pandangan, pikiran, dan keyakinan ideologis HT sehingga dengan memberikan pencerahan spiritual melalui pemahaman Islam yang benar ini, HT mengharapkan masyarakat tertarik dengan gerakan HT dan masuk menjadi anggota untuk memperkuat barisan gerakan HT. Pada intinya, tahapan ini merupakan tahapan pembentukan ideologi dan penanaman Tauhid yang benar kepada setiap individu yang merasa tertarik dengan berbagai pandangan dan pikiran HT. Kalau seseorang telah memahami ajaran Islam berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. maka sudah cukup bagi HT, karena dengan pemahaman demikian akan muncul kesadaran untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

HT masuk ke Indonesia antara tahun 1982-1983 dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada tahun 1990 ide-ide dakwah HT merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.<sup>10</sup> Perjalanannya terkesan lambat dikarenakan adanya kebijakan pemerintah Orde Baru (Orba) yang mengharuskan semua parpol untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal yang terangkum dalam UU No. 3/1985 tanggal 19-02-1985. dengan alasan UU inilah rezim Orba kemudian memberangus segala bentuk lembaga yang berasaskan berbeda.

Pada dekade 1990an, HT mulai masuk ke Yogyakarta dengan embrio dari Ismail Yusanto, alumni Fakultas Teknik UGM dan pernah menjadi pengurus masjid Sholahuddin UGM.<sup>11</sup> Ismail Yusanto dianggap sebagai generasi pertama yang membawa dan menyebarkan ide-ide dan pemikiran HT di Yogyakarta hingga berkembang saat ini. Kemudian pada tahun 1990, ide-ide HT berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disambut baik oleh perkumpulan mahasiswa yang berasal dari UGM, UNY, dan UPN, yang menamakan diri sebagai SANTER (Santri Terbang), sebuah perkumpulan yang konsen dan memiliki semangat untuk mengkaji dan mendalami agama Islam

---

<sup>10</sup> [www.hti.or.id/tentangkami](http://www.hti.or.id/tentangkami). Diakses pada 12 Januari 2010.

<sup>11</sup> Petikan wawancara dengan Ismail Yusanto di Yogyakarta pada 10 Desember 2006. Lihat pula Nur Fuad Hasyim, "HTI di Daerah istimewa Yogyakarta dan Perilaku Politikanya," *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

melalui jalur pesantren yang dilakukan pada saat liburan kuliah.<sup>12</sup> Tahun 2006, Yoyo Tindyo, salah seorang Humas HT DIY, memperkirakan anggota HT di DIY sudah mencapai sekitar 8000 orang.<sup>13</sup>

Dalam perjalanannya kemudian, HT berhasil berkembang di DIY dan membentuk jaringan di beberapa kampus misalnya UGM, UNY, UIN Suka, UMY, UII, UAD, dan STIE Hamfara. Bahkan STIE Hamfara secara terus terang bekerja sama dengan HT DIY maupun HT Indonesia dengan menyediakan beasiswa bebas biaya hingga lulus studi dan diasramakan. Hal ini merupakan satu perkembangan menarik dan sangat signifikan. Jaringan ini banyak menyuarakan pemikiran dan gagasan-gagasan Taqiyuddin al-Nabhani, yang hal ini jarang dilakukan oleh jaringan pergerakan mahasiswa kampus seperti PMII, HMI, IMM, maupun KAMMI.

Dalam konteks kepentingan penelitian ini, penulis melihat bahwa gerakan HT mirip dengan gerakan sosial lainnya yang ada di daerah-daerah dan kampus-kampus. Fenomena ini sebenarnya sangat menarik untuk dikaji, mengingat bahwa kata *hizb* itu sendiri adalah partai, tapi tidak terdaftar sebagai organisasi politik, tetapi organisasi sosial. Sejauh ini gerakan-gerakannya masih dalam tahapan statusnya sebagai gerakan sosial. Padahal di berbagai negara gerakan-gerakannya tetap politis, bahkan subversif. Artikel ini bertumpu pada dua pertanyaan pokok, pertama, siapa saja tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam HT? kedua, seperti apakah konsep HT mengenai negara?

## **B. Hizbut Tahrir sebagai Gerakan Sosial**

Penulis melihat HT lebih merupakan sebagai Ormas Islam yang mencoba menyuarakan *khilafah Islamiyah*. Hal ini jika dilihat dari strategi gerakan dakwah yang HT dengungkan (sebagaimana telah penulis jelaskan di atas) lebih merupakan strategi gerakan sosial. Ciri gerakan sosial menurut Eyerman & Jamison adalah “Tindakan kolektif yang kurang lebih terorganisir, bertujuan perubahan sosial atau lebih tepatnya kelompok individu yang secara bersama bertujuan mengungkapkan perasaan tidak puas secara kolektif di depan umum dan mengubah basis sosial dan politik yang dirasakan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

tidak memuaskan itu.<sup>14</sup> Dalam konteks gerakan sosial, HT dapat dilihat dari setidaknya dua tipe, pertama, gerakan yang berbeda dalam target perubahan yang diinginkan. Menurut Sztompka, gerakan ini ada yang memusatkan pada perubahan struktur sosial, dan ada pula yang pada individual. Gerakan perubahan struktural berupa dua bentuk, gerakan sosial politik yang berupaya mengubah stratifikasi politik, ekonomi, dan kelas. Kemudian gerakan sosio kultural yang ditujukan pada aspek yang kurang teraba dari kehidupan sosial, mengusulkan perubahan keyakinan, nilai, norma, simbol dan pola hidup sehari-hari. Sedangkan gerakan yang lebih menargetkan individu juga mempunyai dua bentuk: gerakan suci, mistik dan religius yang berjuang untuk mengubah atau menyelamatkan anggotanya dan menghidupkan kembali semangat agamanya. Yang kedua gerakan sekuler yang berupaya memperbaiki moral atau mental anggotanya. Jika meminjam teori ini kita melihat HT merupakan gerakan yang berorientasi individual yang mengasumsikan bahwa kualitas individu yang meningkat akhirnya akan membentuk tatanan sosial yang lebih baik. Tipe kedua gerakan sosial yang berbeda mengenai “arah perubahan yang diinginkan”. Kebanyakan gerakan mempunyai arah positif. Gerakan seperti itu mencoba memperkenalkan perubahan tertentu membuat perbedaan. Arah positif ini juga dipertahankan ketika gerakan dimobilisasi untuk mencegah perubahan, baru kemudian arahnya negatif. Kasus khas terjadi ketika gerakan dimobilisasi untuk merespon gerakan yang dinilai negatif yang timbul segera setelah kecenderungan sosial umum menimbulkan dampak sampingan yang tidak diharapkan. Sejumlah gerakan anti modernitas termasuk katagori ini. Misalnya, gerakan yang mempertahankan kultur asli pribumi, memerangi globalisasi, menghidupkan kembali kekhasan nasional atau etnis, menegaskan keyakinan agama fundamental. Penulis melihat secara teoretis HT dapat dimasukkan dalam tipe dua gerakan ini.

Teori gerakan sosial yang dibangun oleh Piötr Sztomka penulis anggap sebagai pijakan teori yang paling tepat dalam memberikan gambaran utuh perihal tema mengenai hal ini. Setidaknya dua penekanan utama yang penulis coba kemukakan disini adalah terkait dengan tipologi perubahan sosial dan ruang gerak yang dapat dijangkau oleh gerakan sosial. Dalam menjelaskan kerangka yang pertama, Sztompka menyajikan

---

<sup>14</sup> Sztompka, *Sosiologi*, hlm. 326.

pemikirannya dalam bentuk bagan tipologi. Hal ini dapat juga digunakan sebagai pijakan awal dalam menjelaskan gerakan yang sedang diusung oleh HT. selanjutnya, pada ranah ruang gerak, sosiolog ini menekankan pada konsep ephenomena dalam menjawab persoalan yang berkaitan dengan cakupan ruang gerak yang dapat ditembus oleh HT. Konsep ini penulis pandang sangat baik dalam memberikan penjelasan tentang kemungkinan bagi HT untuk mencapai target pergerakan yang selama ini dicanangkannya, terutama sekali pada pendirian negara Islam, yang bermakna mengislamkan seluruh negara dengan satu komando tunggal.

### **C. Masuknya HT di Indonesia**

HT masuk ke Indonesia antara tahun 1982-1983. Ini berarti 29 tahun setelah HT pertama kali didirikan oleh al-Nabhani pada 1952. Jika dibandingkan dengan yang lain, HT di Indonesia, terbilang terlambat. Sementara di tempat lain, misalnya di Suriah, Lebanon, Kuwait, dan Irak, HT berkembang cukup pesat dengan rentang waktu yang terpaut pendek dari masa kelahirannya, yakni sekitar tahun 1960-an.<sup>15</sup>

Secara umum, pada awal-awal tahun masuknya HT, organisasi ini harus berhadapan dengan rezim Orde Baru, yang cenderung represif dan tidak demokratis yang mengakibatkan hampir semua gerakan Islam menjadi gerakan bawah tanah. Ditambah lagi dengan disahkannya UU No 3/1985 tanggal 19-2-1985 yang mengharuskan semua partai politik untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal. Dengan asas tunggal inilah pemerintah Orba memberangus siapa saja yang mempunyai asas berbeda.<sup>16</sup> Baru setelah berakhirnya Orba, secara serentak aktivitas organisasi ini di Indonesia, termasuk HT mendapatkan kemerdekaannya dalam berdakwah, mereka tidak lagi dibayang-bayangi rasa takut, seperti yang dirasakan pada masa Orde Baru.

Menurut Syamsul Arifin, masuknya HT ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tokoh yang bernama Mama Abdullah Nuh, pengelola pesantren al-Ghazali, Bogor. Persinggungan Mama Abdullah ini dengan HT dimulai saat ia mengundang salah

---

<sup>15</sup> Suha Tahi Farouki, "Hizb al-Tahrir al-Islami" dalam John L. Esposito (Ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jilid II, (Bandung: Mizan, 2001). Hlm. 121.

<sup>16</sup> Faisal Ismail, *Islam, Transformasi Sosial dan Kontinuitas Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 2001, hlm. 42.

seorang aktivis HT, Abdurrahman al-Baghdadi, dari Libanon, yang tinggal di Australia untuk membantu pesantrennya. Dari sini kemudian persemaian HT dengan para aktivis dakwah dimulai, dengan Mesjid al-Ghiffari, Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu tempat interaksi antar aktivis.<sup>17</sup> Pada awalnya HT cabang Indonesia dipimpin oleh Nuh, setelah ia meninggal dunia HT dipimpin oleh Muhammad al-Khathath, dengan Ismail Yusanto sebagai Jubirnya.

Kelahiran Hizbut Tahrir Indonesia dibidani dan dipelopori oleh beberapa orang anggota dan simpatisan HT yang telah bersentuhan langsung dengan gerakan ini di Timur Tengah. Oleh karena itu, tidak heran jika nama, bentuk, doktrin, ideologi, dan metode gerakannya benar-benar mengikuti HT di Timur Tengah. Bahkan HT Indonesia merupakan cabang resmi dari jaringan HT internasional dan bertanggungjawab kepada pengurus pusat HT di Yordania.<sup>18</sup>

### **1. Abdullah Bin Nuh**

Abdullah bin Nuh (1905-1987) adalah seorang ulama terkenal, sastrawan, penulis, pendidik, dan pejuang. Semenjak kecil Nuh, yang sering pula mendapat sebutan Mama Abdullah, memperoleh pendidikan agama Islam dari ayahnya, KH. Raden Nuh, seorang ulama di kota Cianjur. Di samping itu, ia masuk sekolah I'anat at-Thalib al-Miskin yang didirikan oleh ayahnya. Dari sekolah itu ia berhasil lihai dalam bahasa Arab. Pada usia yang relatif muda ia sudah menghafal kitab *Nahwu Alfiah* (nahwu/tata bahasa berbait seribu) di luar kepala. ia juga mempelajari sendiri bahasa Inggris.

Pada masa mudanya Abdullah menjadi staf pengajar pada Hadramaut School, dan karena kemampuan bahasa Arabnya, Abdullah kemudian diangkat sebagai pemimpin redaksi majalah mingguan berbahasa Arab, *Hadramaut*, yang ada di Surabaya (1922-1926). Kemampuan berbahasa ini pula yang pada tahun 1926 mengantarkannya untuk belajar ke Fakultas Syariah Universitas al-Azhar (Kairo) selama dua tahun. Sekembalinya dari Kairo ia mengajar di Cianjur dan Bogor (1928-1943).

---

<sup>17</sup> Arifin, *Ideologi...* hlm. 122. Bandingkan, Hartono, "Kontestasi Penerapan Syariat Islam Di Indonesia Dalam Perspektif HTI Dan MMI," Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>18</sup> Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal...* hlm. 162.



Pada masa-masa perjuangan melawan kolonial, Abdullah bergabung menjadi anggota Pembela Tanah Air atau Peta (1943-1945) wilayah Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Sekitar 1945-1946 ia memimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kemudian, tahun 1948-1950 Abdullah menjadi anggota Komite Nasional Pusat (KNIP) di Yogyakarta, di samping sebagai kepala seksi siaran berbahasa Arab pada Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta dan dosen luar biasa pada Universitas Islam Indonesia (UII).

Karir-karir itu kemudian mengantarkannya juga ke Jakarta, pusat kekuasaan, sehingga tahun 1950-1964 Abdullah bin Nuh memegang jabatan sebagai kepala siaran bahasa Arab pada RRI Jakarta. Karir akademiknya berlabuh di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1964-1967), sebagai professor Sastra.<sup>19</sup> Tahun 1969 ia mendirikan majlis al-Ghazali dan Pesantren al-Ihya di Bogor. Di tempat inilah kemudian aktivitas HT dimulai.

Di Bogor, Abdullah bin Nuh aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamiah dan mendidik kader-kader ulama. Ia juga menyempatkan diri untuk menghadiri pertemuan dan seminar-seminar tentang Islam di beberapa negara, antara lain di Arab Saudi, Yordania, India, Irak, Iran, Australia, Thailan, Singapura, dan Malaysia. Ia juga ikut serta dalam Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) sebagai anggota panitia dan juru penerang yang terampil dan dinamis.

Keterlibatan Abdullah bin Nuh dalam aktivitas HT bermula kontakannya dengan para aktivis HT di Australia, yakni salah satunya dengan Abdurrahman al-Baghdadi. Kemudian hal ini dilanjutkan oleh puteranya, Musthafa Abdullah bin Nuh yang pernah belajar di Jordan, yang di negeri itu ia menjadi aktivis halaqah HT, kemudian dilanjutkan dengan studi Musthafa ke Australia.

Di Australia inilah Abdullah bin Nuh, terutama saat mengunjungi puteranya, banyak berinteraksi dengan aktivis HT dan bertemu dengan Abdurrahman al-Baghdadi. Hingga akhirnya, Abdullah mengundang al-Baghdadi untuk datang ke Bogor dan menetap di pesantrennya untuk membantu aktivitas dakwah di Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Agus Salim, "The Rise of Hizbut Tahrir in Indonesia 1982-2004," *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005, hlm. 128.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

## 2. Abdurrahman al-Baghdadi dan Al-Khatthath

Telah disebut bahwa Abdurrahman al-Baghdadi adalah aktivis HT dari Tripoli, Libanon. Tetapi ia menjadi penduduk tetap di Australia. Pada umur 28 tahun, karena Abdullah bin Nuh tertarik dengan pengetahuan dan keterampilannya, ia diundang ke Indonesia dan tinggal di Bogor. Di kota ini al-Baghdadi tinggal dan menikah dengan perempuan kota tersebut.

Al-Baghdadi aktif menulis berbagai artikel dan ceramah mengenai HT. Ia juga menjadi salah satu pengajar pada Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LPBA) yang merupakan embrio dari Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Ilmu bahasa Arab (LIPIA) serta beberapa kampus lain seperti Universitas Ibnu Khaldun. Al-Baghdadi juga aktif mengajar mahasiswa-mahasiswa muda di berbagai kampus di Surabaya dan Yogyakarta yang tertarik dengan gagasan-gagasannya.

Al-Khatthath, yang memegang posisi Amir HT Indonesia adalah salah satu muridnya. Semenjak kedatangan al-Baghdadi, al-Khatthath dan kawan-kawannya yang berada di lingkungan Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM)<sup>21</sup> Institut Pertanian Bogor kemudian berguru kepada al-Baghdadi. Selanjutnya untuk mengakomodir ini kemudian para aktivis BKIM membentuk kelompok belajar (yang dalam HT disebut sebagai *halaqah*) untuk mempelajari gagasan-gagasan HT. Para aktivis yang mengikuti halaqah ini atau *halaqah ula*, dalam bahasa HT, merupakan aktivis yang pertama di mana pada *halaqah ula* ini subjek pembelajarannya belum tersistematika dengan mapan, dalam artian, materinya hanya diberikan oleh Abdurrahman al-Baghdadi.<sup>22</sup> Namun kabar terkini al-Khatthath dikeluarkan dari HT. Tidak diketahui secara jelas mengapa ia keluar dari HT, namun yang jelas pada pemilu legislatif kemarin, dia mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dengan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai kendaraan politiknya.

## D. Perkembangan HT di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

---

<sup>21</sup> Dari BKIM inilah kemudian HT menyebar pada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di Indonesia. Dan HT memang pada awalnya muncul melalui LDK-LDK ini.

<sup>22</sup> Agus Salim, *The Rise.....*, hlm.127-128.

HT, sebagaimana dinyatakan dan diakui oleh para aktivisnya, merupakan parpol, yakni parpol yang berideologi Islam. HT merupakan kelompok politik, bukan kelompok yang hanya berdasarkan pada kerohanian semata, bukan lembaga pendidikan (akademis), bukan lembaga sosial, dan bukan lembaga ilmiah. Namun dalam praktiknya, khususnya di Indonesia, HT lebih merupakan gerakan organisasi kemasyarakatan, dan tidak sebagai partai politik sebagaimana lazimnya partai politik dalam pengertian yang lazim dan menjadi bagian dari sistem politik modern yang terlibat dalam fungsi-fungsi politik. Kelompok ini tampaknya memiliki pengertian sendiri tentang politik dan partai. Politik merupakan bagian dari aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Latar belakang kelahiran HT secara substansif dari segi ajaran Islam didorong oleh kehendak untuk memenuhi seruan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 104, yang memerintahkan kaum muslim untuk membentuk suatu kelompok (jamaah) yang bergerak dalam dua aktivitas, pertama mengantar kepada kebaikan yaitu mengajak kepada Islam. Kedua, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran.<sup>23</sup>

Pada awal 1988 sejumlah aktivis dari HT Bogor mengadakan pelatihan di masjid UGM, dan merekrut Ismail Yusanto sebagai anggota. Tokoh yang disebut terakhir ini merupakan embrio untuk pengembangan HT di DIY. Ismail Yusanto lahir di Yogyakarta pada 2 Desember 1962, dan merupakan mahasiswa jurusan Geologi pada Fakultas Teknik UGM angkatan 1988, yang kemudian mondok di Pesantren Ulil al-Baab, Bogor hingga tahun 1991, dan menetap di sana. Orang inilah yang pertama kali membawa peran penting dalam penyebaran HT di DIY dari kampus hingga ke daerah-daerah pelosok.<sup>24</sup> Sejumlah tokoh penting lain selain Yusanto adalah Ust. Rasyid Supriyadi (mantan ketua Santri Terbang (SANTER) dan sekarang menjadi ketua DPD I DIY), Aris Nasuha (mantan koordinator SANTER, sekarang menjadi Lajnah Fa'aliyah DPD I HT DIY), Abu Haris Al-Amin, M. Siddiq al-Jawi, Yoyok Tindyo Prasetyo, (Humas HT DIY) dan Muhammad al-Khathath yang sekarang menjabat sebagai Sekjen DPP HT serta beberapa tokoh lainnya.

---

<sup>23</sup> Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: Psap), 2007, hlm. 405-406.

<sup>24</sup> M. Ismail Yusanto, "Mengkampanyekan Syariah dan *Khilafah* Islam dari Indonesia sampai Amerika", dalam <http://www.Hizbut-tahrir.or.id>. Diakses pada tanggal 06-5-2010.

Perkembangan HT pada saat pertama kali masuk di DIY tidak dapat terlepas dari peran Masjid Kampus UGM yang dijadikan sebagai benteng pertahanan sekaligus basis gerakan organisasi ini, dari sinilah aktivitas-aktivitas pengkajian kelompok-kelompok kecil mulai digelar di masjid kampus tersebut. Sejak tahun 1991 masjid kampus ini telah digunakan sebagai pusat pembiasaan para calon anggota HT dalam bentuk halaqah-halaqah, sampai sekarang masjid UGM masih tetap digunakan sebagai tempat pengkaderan yang biasanya mengadakan pertemuan setiap malam jumat dan minggu. Selain Masjid UGM, kegiatan-kegiatan mereka dilakukan juga di Masjid Mujahidin UNY, Masjid Mardliyyah Jl. Kesehatan No. SKIP Utara Yogya. Dari sinilah kader-kader HT pertama kali mulai bermunculan di DIY, dan pada perkembangannya mereka mulai diterima di masyarakat yang selanjutnya menyebar ke sejumlah Universitas Negeri/Swasta yang ada di DIY seperti, UGM, UNY, UMY. UII, UAD, ISI, UIN Sunan Kalijaga, STIE HAMFARA, dan lain-lain.

Setelah mengalami kemandekan setelah pengkaderan pada 1988, kemudian pada tahun 1990 HT di DIY dengan ide-ide pemikirannya, disambut baik oleh perkumpulan sekelompok mahasiswa yang berasal dari UGM, UNY, dan UPN yang menamakan dirinya sebagai SANTER. SANTER berdiri sekitar tahun 1985 dan pada dasarnya merupakan perkumpulan mahasiswa yang mempunyai semangat untuk mengkaji dan mendalami tentang agama Islam melalui jalur pesantren yang dilakukan pada saat liburan kuliah. Setelah melakukan aktivitasnya lebih kurang 3 tahun para aktivis SANTER lambat laun merasakan adanya sesuatu yang kurang, sehingga mereka mulai mencari ide untuk membentuk sebuah format gerakan yang jelas arah dan tujuannya. Akhirnya, pada 1990 di bawah Aris Nasuha yang pada saat itu menjadi koordinator SANTER bersama Supriyadi, Dwi Condro, Andang, dan Dayudi, melakukan perjalanan ke Bogor untuk bertemu dengan salah satu aktivis HT di Masjid al-Ghiffari. Sebelum kedatangan mereka ke Bogor, sebenarnya Aris Nasuha telah terlebih dahulu mengenal HT lewat temannya yaitu Narbowo dan Munarji yang pada saat itu kuliah di IPB, Bogor. Selama di Bogor mereka sempat bertemu dengan al-Khathath, Ismail Yusanto,

dan sejumlah aktivis HT di Bogor. Setelah tiga hari berada di Bogor, mereka kembali ke DIY. Dan mengkader para anggota SANTER.<sup>25</sup>

Di tengah semangatnya untuk melakukan kajian Islam, SANTER terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang setuju dengan ide-ide HT yang diwakili oleh Aris Nasuha dan kawan-kawannya dan kelompok yang kedua yaitu mereka yang menginginkan agar SANTER dapat bersifat netral. Dari kelompok pertama inilah ide-ide HT diterima dan pada akhirnya berkembang di DIY. Lebih lanjut, setelah ide-ide HT itu diterima oleh SANTER, maka dengan segera Ismail Yusanto, diutus dari Bogor untuk membina secara intensif terhadap sejumlah mahasiswa yang ada di SANTER yang pada saat itu berjumlah lebih kurang 10 orang. Pembinaan ini dilakukan satu bulan sekali selama 5 tahun yaitu mulai tahun 1990-1995. Pada masa-masa 1996 dan setelahnya merupakan masa kemunduran bagi SANTER. Hal ini mengakibatkan anggota SANTER banyak yang keluar. Hal ini dikarenakan sebagian besar aktivis SANTER terfokus pada aktivitas HT. Sejak saat itu, mereka tidak lagi aktif sebagai SANTER, melainkan resmi menjadi aktivis HT DIY.

Pada kurun waktu 1990-2000 masuknya HT ke DIY masih banyak mendapatkan respon negatif bahkan ada yang terang-terangan menolak terhadap kehadiran organisasi ini misalnya pada saat HT DIY mengadakan halaqah di masjid- masjid umum banyak yang tidak memberikan ijin bagi kegiatan mereka. Kemudian baru pada tahun 2003, kehadiran HT mulai mendapatkan respon yang positif di wilayah DIY dan sekitarnya. Tidak hanya itu pada perkembangannya di tahun 2004, para aktivis HT DIY khususnya mereka yang berasal dari kalangan mahasiswa membentuk sebuah perkumpulan baru yang diberi nama Gema Pembebasan (Gerakan Mahasiswa Pembebasan). Yaitu merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang memfokuskan diri pada 3 aktivitasnya, yaitu penguatan penyebaran pemikiran Islam, Pembinaan kader dan penguatan jaringan organisasi antar kampus di DIY. Selain itu, gerakan ini juga bertujuan untuk membentuk opini Islam Ideologi di kalangan mahasiswa. Dalam setiap aksinya mereka menyerukan pendirian *Khilafah Islamiyah*, sama halnya dengan HT di DIY, organisasi ini juga

---

<sup>25</sup> Petikan wawancara dengan Aris Nasuha, di Sleman, pada 10 Januari 2007, dalam Fuad Hasyim, "HTI di DIY dan Perilaku Politikanya," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 56, *Skripsi*, tidak terbit.

banyak mengambil prinsip dari pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani dan apabila dibandingkan dengan pergerakan mahasiswa lainnya seperti HMI, IMM, PMII, maupun KAMMI organisasi ini jauh lebih muda.

Tiga tahun kemudian, tepatnya sejak awal didirikannya organisasi mahasiswa ini, pada 2004-2006 gerakan ini telah berhasil membentuk jaringan di beberapa kampus di DIY, seperti UGM, UNY, UIN, UNY, UMY, UAD, STIE HAMFARA. Untuk kampus yang penulis sebutkan terakhir ini (STIE HAMFARA) merupakan lembaga pendidikan yang secara langsung bekerja sama dengan HT DIY maupun HT Indonesia, dan setiap tahunnya menyediakan beasiswa bebas biaya sampai lulus bagi 300 calon mahasiswa yang studi di STIE tersebut. Hanya saja bagi mereka yang mendapatkan beasiswa tersebut harus tinggal di asrama, dan nantinya di asrama tersebut, mereka didoktrin dan dibina sedemikian rupa dengan ide-ide pemikiran HT.

#### **E. Pandangan HTI Mengenai Negara**

Dalam mengartikan Negara, HT memiliki cara pandang yang berbeda dari kebanyakan kelompok Islam lainnya. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan rentetan perdebatan panjang yang tampaknya sulit untuk menemukan ujungnya. Salah satu semangat yang sedang diusahakan oleh kelompok ini ialah pendirian kembali negara Islam. Yakni negara yang dipimpin oleh seorang *khalifah* yang mendapat bai'at dari kaum muslim, dasar-dasar yang digunakan dalam negara ini adalah dasar-dasar yang diambil dari ajaran-ajaran Islam. Sebuah model negara yang diyakini akan mampu memperbaiki segala permasalahan yang kini menghinggapi sebagian besar Negara, sebab model negara ini adalah model yang dianggap paling ideal bagi manusia. Hal ini juga disandarkan pada kepercayaan bahwa pendirian negara ini bukan saja tuntunan agama, melainkan kewajiban yang harus dilakukan. Dengan demikian, otomatis Allah akan 'ikut campur' di dalamnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Di banyak literatur dapat dijumpai bahwa dalam beberapa hal model *khilafah* ini sedikit banyak memiliki kesamaan dengan model teokrasi. Sebab seorang khalifah tidak hanya dipandang sebagai pemimpin umat atau masyarakat, tetapi juga sebagai wakil Allah dan Rasullullah. Salah satu klaimnya adalah, *khalifah* memimpin negara berdasarkan perintah Allah saw. Aridianto, *Sekilas tentang negara Islam*. [www.aridianto.blogspot.com](http://www.aridianto.blogspot.com). Diakses 8 Januari 2010.

Untuk membahas masalah ini, terlebih dahulu diperlukan pemahaman tentang bagaimana HT memandang negara, aspek-aspek apa sajakah yang harus ada dalam sebuah negara versi kelompok ini, jikapun ternyata ada perbedaan yang mendasar mengenai konsep negara yang ditawarkannya dengan konsep negara yang selama ini ada, maka apa sajakah perbedaannya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat bahwa semangat pendirian negara Islam yang sedang dikembangkan oleh gerakan yang memiliki skala internasional ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat, sehingga kerap kali muncul pemahaman yang kurang tepat (untuk tidak menyebutnya salah) terhadap model negara yang sedang mereka upayakan ini. bahkan tidak jarang kelompok-kelompok oposisi melabeli perjuangan mereka sebagai usaha utopis, nostalgia masa silam, ilusi, dan berbagai label-label miring lainnya.

Sebagai pendiri partai yang menggunakan asas Islam ini, Taqiyuddin al-Nabhani membantah tuduhan-tuduhan di atas dengan menyatakan, ‘Daulah Islam bukanlah khayalan seorang yang tengah bermimpi, sebab terbukti telah memenuhi pentas sejarah selama 13 abad. Ini adalah kenyataan. Keberadaan Daulah Islam merupakan kenyataan di masa lalu dan akan menjadi kenyataan pula di masa depan, tidak lama lagi. Sebab, faktor-faktor yang mendukung keberadaannya jauh lebih kuat untuk diingkari oleh jaman atau lebih kuat untuk ditentang. Saat ini telah banyak orang yang berpikiran cemerlang. Mereka itu adalah bagian dari umat Islam yang sangat haus akan kejayaan Islam.’<sup>27</sup> Meski tetap mengusung tema Daulah Islam, namun pada perkembangannya model ini mendapat banyak koreksi dari berbagai kalangan. Kendatipun demikian, semangat untuk tetap mempertahankan *Daulah Islam* sebagaimana ia dikonsepsikan untuk pertama kali (tanpa koreksi) tetap ada. Oleh karenanya pembelajaran yang lebih lanjut mengenai hal ini, menurut hemat penulis, sangat diperlukan.

#### **F. Negara Islam: Antara Totalitas dan Kontekstualitas**

Sebelum membahas lebih jauh tentang gagasan-gagasan dan unsur-unsur pelengkap dalam negara Islam, perlu untuk terlebih dahulu diamati latar belakang munculnya pemikiran seperti ini. Pada kondisi zaman apakah pemikiran tentang

---

<sup>27</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah Islam* Terj. Umar Faruq, dkk. (Jakarta: HTI-Press, 2009) hlm. 11.

pentingnya pendirian negara Islam muncul, hal ini penting untuk diketahui sebagai tolak ukur dari berbagai kemungkinan yang muncul terkait dengan ide tersebut. Salah satunya adalah, apakah pendirian negara Islam ini murni didasari atas ketundukan akan perintah-perintah agama atau justru rencana ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain. Taqiyuddin al-Nabhani, yang merupakan pencetus ide pendirian (kembali) negara Islam, telah merumuskan perihal ketatanegaraan ini dalam sebuah buku. Di Indonesia, buku ini diterjemahkan oleh Maghfur Wachid dengan judul '*Sistem Pemerintahan Islam, Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*'.

Terkait dengan penulisan buku ini, amir kedua HT Syaikh Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa ide tersebut muncul di saat pemikiran Barat sangat mencengkeram pemikiran kaum terpelajar putra-putri muslim. Islam adalah agama monastisme (kependetaan), bahwa Islam tidak memiliki sistem pemerintahan bagi sebuah negara dan negaranya merupakan negara yang religius spiritualis. Melalui buku tersebut, alumni universitas al-Azhar Mesir ini menegaskan bahwa bentuk pemerintahan Islam bukan monarki, sebab pewarisan bukan kepada putra mahkota. Juga bukan sistem republik dengan pilar sistem demokrasi yang kedaulatannya di tangan rakyat. Pemerintahan Islam juga bukan kekaisaran yang memberi keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan ekonomi di wilayah pusat. Juga bukan sistem federal yang membagi wilayah dalam otonomi.<sup>28</sup>

Aroma 'perang' ideologi tampak kental melatari muncul (atau dimunculkan) nya gagasan pendirian negara Islam. Pada akhirnya, hal ini membuat Taqiyuddin merasa perlu untuk tidak hanya memaparkan 'isi' dari ajaran Islam dengan memberikan data-data tentang adanya kepedulian agama Islam terhadap urusan ketatanegaraan, tetapi juga membumikan ajaran-ajaran tersebut ke dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terlebih, ia meyakini bahwa semenjak dihancurkannya bentuk *khilafah* pada 24 Juli 1924 di Turki oleh Mustafa Kemal Attaturk, negara Islam sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya, pendirian kembali sebuah negara yang menggunakan hukum-hukum yang bersumber dari Allah sebagai aturan kenegaraannya perlu untuk dilakukan. Sejarah

---

<sup>28</sup> Farid Hadjiry, *Tata Negara Islam menurut Taqiyuddin al-Nabhani*, dalam, <http://www.khabarislam.com/tata-negara-islam-menurut-taqiyuddin-an-nabhani.html>



mencatat, terdapat setidaknya dua alasan bagi Taqiyuddin untuk mendirikan partai sebagai sarana penyebaran dakwahnya. Yakni, Pertama, pendudukan Palestina oleh Inggris yang disertai dengan migrasi kaum Yahudi secara massif ke Palestina. Hal inilah yang menyebabkan cita-cita awal Syaikh ini adalah bagaimana caranya memerdekakan Palestina. Atas dasar ini ia menulis bukunya yang istimewa, *Inqadz Falistin* (Membebaskan Palestina), dua tahun setelah Palestina jatuh ke tangan Yahudi.

Kedua, tumbuh suburnya gerakan komunis dan gerakan nasionalis di negeri Syam sebagai pengaruh pemikiran Barat dan akibat tidak adanya gerakan Islam yang seimbang pada saat itu. Dari sini ia banyak mengkritik gerakan al-Ikhwan al-Muslimun. Kemudian ia mendirikan HT dengan bertumpu pada beberapa kader pergerakan di Palestina dan Yordania. Tujuannya adalah agar partai barunya ini mengambil corak partai yang berbeda dengan partai-partai yang sudah ada.<sup>29</sup> Dalam memperkuat pandangannya, mantan hakim di Mahkamah Syariah, Palestina ini mengungkapkan seluruh keburukan dan kegagalan sistem-sistem selain sistem Islam yang pernah digunakan oleh sebagian besar negara di dunia ini. Dengan demikian pemunculan sistem Islam ini dicanangkan menjadi serangan balik atau balasan terhadap kegagalan demi kegagalan sistem-sistem non-Islam di atas.

Semenjak HT berdiri pada 1953, agenda awal dan mungkin yang utama adalah pendirian negara Islam. Semenjak itu pula awal perjuangan mereka dikumandangkan. Awalnya, mereka memasang target pendirian negara Islam ini dalam jangka waktu 13 tahun, namun pada jangka waktu yang pertama ini agenda besar partai ini tidak terlaksana, sehingga tempo pendirian negara Islam diperpanjang lagi hingga 30 tahun. Tetapi nyatanya agenda tersebut belum juga terlaksana hingga saat ini.<sup>30</sup> Namun hal ini tidak mematahkan semangat kelompok yang hingga tahun 2006 diperkirakan telah mampu menyebar ke lebih dari 25 negara ini untuk terus memperjuangkan cita-cita awalnya, yakni mendirikan negara Islam. Hal ini tampak dari keseriusan mereka untuk

---

<sup>29</sup> M. Yasin Muthohar, *Lingkungan pemikiran dan politik syekh Taqiyuddin al-Nabhani*, www.hizbut-tahrir.or.id, 27 Maret 2010.

<sup>30</sup> Dari sini, nuansa politis tampak lebih mengambil peran dalam pendirian 'Negara Allah' ini, sebab cita-cita utama pendirian negara ini bukan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi penanaman paham ala Hizbut Tahrir. Dalam melakukan 'misi' ini, mereka kerap kali terlibat dalam perang ideologi. Front pembela aqidah ahlussunnah, *Bahaya Hizbut Tahrir (jilid 1)*. www.darulfatwa.org.au; 2006.

secara total menceburkan diri ke dalam ranah politik. Oleh karenanya muncul klaim bahwa kelompok ini murni kelompok politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan).<sup>31</sup>

Pada perkembangannya, semangat untuk mendirikan negara Islam ini bukan hanya bertitik tekan pada cita-cita partai saja, tetapi bahkan menjurus kepada masalah identitas seorang muslim. Hal ini kemudian secara otomatis memberikan klaim bahwa hanya seorang yang turut memperjuangkan terlaksananya negara Islam sajalah yang disebut muslim, selebihnya bukan. Pemahaman seperti ini mereka dasarkan pada salah satu Firman Allah dalam Al-Baqarah: 208.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Ali ash-Shabuni menegaskan, bahwa ayat tersebut memerintahkan kaum Muslim untuk melaksanakan seluruh hukum Islam; tidak boleh melaksanakan hanya sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain.<sup>32</sup> dalam pandangan HT –dan ini yang hingga kini masih menjadi perdebatan penegakan kembali syari’ah Islam merupakan kewajiban seluruh umat muslim. Bahkan usaha ini dapat digolongkan dalam ‘Jihad’. Yakni jihad untuk membebaskan negeri-negeri Islam yang sedang diduduki dan didominasi oleh kaum kafir. Yang harus dilakukan oleh umat ialah menekan pemerintahan agar supaya melawan pendudukan dan dominasi dari kaum kafir tersebut.

Bentuk tekanan-tekanan yang dapat diberikan kepada pemerintahan ialah dengan penyampaian ide-ide serta gagasan-gagasan baru tentang sistem pemerintahan yang diyakini mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. HT memandang sistem *khilafah* sebagai harga mati bagi kebangkitan bangsa, untuk mewujudkan kebangkitan tersebut,

---

<sup>31</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Tentang kami: Home* dalam, [www.hizbut-tahrir.co.id](http://www.hizbut-tahrir.co.id).

<sup>32</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, ‘Bangkitlah Dengan Islam,’ dalam *Al Islam*. [www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id); 19 Mei 2010.

metodenya adalah dengan membangun pemerintahan/negara berlandaskan pemikiran (*fikrah*) akidah Islam. Inilah satu-satunya cara untuk meraih kebangkitan. Untuk menuju pada kebangkitan yang hakiki, negara ini harus mengadopsi sistem *khilafah*, sebagai satu-satunya metode *syar'i*, yang akan menerapkan syariah Islam secara *kaffah*.<sup>33</sup> Dari sini jelas bahwa sasaran HT adalah mengubah sistem yang selama ini dipakai dengan sistem Islam.

Ahmad al-Qoshos bahkan menyebutkan, dalam kaitannya dengan usaha pendirian negara Islam ini HT telah mengharuskan dirinya (berkomitmen untuk) terikat dengan metode Islam dalam melakukan perubahan. HT berpendapat bahwa masalahnya sekarang adalah mewujudkan kehidupan Islam; dan juga berpendapat bahwa kehidupan Islam tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan terlebih dahulu sistem (kekuasaan) Islam, yang akan menerapkan syariah Islam.<sup>34</sup> Penekanan terhadap perubahan pada ranah sistem ini didasari pada anggapan bahwa hanya negara yang dipimpin, diatur dan didasari atas hukum-hukum Islam saja yang dapat disebut sebagai negara Islam, oleh karenanya istilah negara Islam sangat berbeda dengan negara 'berpenguasa' Islam. Dengan demikian Sudan, Iran, Pakistan bahkan Arab Saudi sekalipun, bukan negara Islam.<sup>35</sup>

HT bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslim kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan *Daulah Islamiyah*, yaitu *Daulah Khilafah*, yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibi'at oleh kaum muslim untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Di samping itu, HT bertujuan membangkitkan kembali

---

<sup>33</sup> Akhiril Fajri, 'Hanya dengan *Khilafah*, Negara Bangkit,' dalam, *al-Ta'fikir Institute Lampung*. <http://hizbut-tahrir.or.id> 2 Mei 2010.

<sup>34</sup> Ahmad al-Qoshos, 'Jihad Hukumnya Wajib!,' dalam, <http://hizbut-tahrir.or.id> 23 Februari 2010.

<sup>35</sup> Aridianto, *Sekilas*, hlm. 1.

umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. HT berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Negara *Khilafah* akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi pada masa silam—yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. HT bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari’at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.<sup>36</sup>

Satu hal yang menjadi patut untuk diperhatikan adalah kenyataan serta kesadaran kelompok ini untuk mengakui bahwa usaha mereka selama ini merupakan ‘proyek’ lanjutan dari kesuksesan serta kegemilangan sistem *khilafah* di masa silam. HT begitu yakin usaha mereka akan berujung pada kesuksesan, sebab sejarah telah menjadi saksi betapa sistem khalifah pernah berjaya untuk jangka waktu yang lama (13 abad), sehingga usaha untuk menggali kembali kejayaan itu bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Menjadikan ‘cerita indah’ di masa lalu sebagai pemompa semangat perjuangan merupakan salah satu ciri utama kelompok ini. maka tidak heran jika dalam salah satu buku pedoman HT bagi terciptanya negara Islam, yakni ‘al-Daulah al-Islamiyah’, Taqiyuddin al-Nabhani, sebagai penulis buku tersebut, memasukkan 80% lebih cerita-cerita klasik tentang *khilafah* di masa lalu. Pada akhirnya, cerita-cerita klasik tersebut mengerucut kepada kesimpulan bahwa mendirikan negara Islam hukumnya adalah wajib. Taqiyuddin menegaskan ‘Wajib atas kaum muslim untuk menegakkan Daulah Islam, sebab Islam tidak akan terwujud dengan bentuk yang berpengaruh kecuali dengan adanya negara. Demikian juga, negeri-negeri mereka tidak dapat dianggap sebagai negara Islam kecuali jika Daulah Islam yang menjalankan roda pemerintahannya.’<sup>37</sup>

Pemikiran tentang totalitas Islam dalam segala aspek kehidupan manusia tampak sangat mempengaruhi pola pikir Taqiyuddin. Munawir Syadjali menjelaskan perihal ini dengan baik sekali, melalui bukunya ‘*Islam dan Tatanegara*’, ia memaparkan bahwa

---

<sup>36</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, ‘Tentang kami: Home’ dalam, [www.hizbut-tahrir.co.id](http://www.hizbut-tahrir.co.id).

<sup>37</sup> Al-Nabhani, *Daulah Islam*, hlm. 12.

terdapat tiga aliran pemikiran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan. Pertama, Klaim bahwa Islam adalah agama yang sempurna menjadi dasar bagi gerakan yang berkeinginan mendirikan negara Islam, sebab agama yang sempurna di sini dipahami sebagai agama yang mencakup segala bidang, termasuk ketatanegaraan. Kedua, Islam, sebagaimana ia dipahami oleh kalangan orientalis, tidak memiliki kaitan sama sekali dengan ketatanegaraan. Terlebih bahwa Nabi diutus untuk menuju kehidupan yang mulia dan menjunjung budi pekerti luhur, tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan suatu negara. Ketiga, menolak Islam sebagai agama yang lengkap, tetapi juga menolak pandangan Barat tentang Islam. Islam menurut aliran ini tidak memiliki sistem ketatanegaraan tetapi seperangkat tata nilai etika kehidupan bernegara.<sup>38</sup>

Jika merunut pada model pemikiran seperti di atas, maka pemikiran yang ada pada golongan HT termasuk dalam jenis pemikiran pada tipe yang pertama. Dengan demikian, beragama Islam dengan hanya melakukan rukun Islam yang lima saja tidak cukup. Diperlukan usaha nyata untuk menjadikan hukum-hukum Allah berjalan di muka bumi ini. Pemahaman semacam ini mengakar begitu kuat dalam diri HT, sehingga berbagai upaya pelengseran pemerintahan ‘kafir’ dilakukan secara terus menerus. HT telah melancarkan beberapa upaya pengambil alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti Yordania pada tahun 1969, di Mesir tahun 1973, dan Iraq tahun 1972. Juga di Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Sebagian upaya kudeta ini diumumkan secara resmi oleh media massa, sedangkan sebagian lainnya memang sengaja tidak diumumkan.<sup>39</sup>

Sebagai sebuah partai politik, HT merasa bukan saja bertanggung jawab terhadap berdirinya negara Islam di negerinya sendiri, tetapi juga di negeri-negeri lain di dunia. Sementara negara-negara yang banyak itu tidak dipandang sebagai sebuah negara yang terpisah satu sama lain, melainkan sebuah kesatuan, satu dalam Islam. Mengutip pernyataan Taqiyuddin al-Nabhani dalam *Daulah Islamiyah*: “Persoalannya bukanlah mendirikan banyak negara, melainkan membangun negara yang satu di seluruh dunia Islam.”<sup>40</sup> Dengan demikian, tidak mengherankan jika partai pembebasan ini memiliki

---

<sup>38</sup> Hadjiry, *Tata Negara*, hlm. 1.

<sup>39</sup> Nasyrah Hizbut Tahrir, *Ma'fhum al-Adalah al-Ijtima'iyah*, Beirut, cetakan II, 1991, hlm. 140-151.

<sup>40</sup> Al-Nabhani, *Daulah Islam*, hlm. 11.

semangat untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dasarnya adalah, demi terlaksananya hukum Allah di muka bumi ini.

Dalam kaitannya dengan penggulingan pemerintahan, kudeta dapat dikategorikan sebagai usaha terakhir. Sebab sebelum semua itu terjadi, HT—sebagaimana - 22 -na hal ini diajarkan oleh sang pendirinya— membuka keburukan-keburukan pemerintahan yang ada, sehingga dengannya, legitimasi atas kudeta yang dilakukan tersedia. Tampaknya, penyebaran opini buruk tentang pemerintahan termasuk dalam agenda utama dalam upaya pelaksanaan kudeta. Hal ini dapat ditemukan dalam himbauan al-Nabhani berikut.

“ ... semestinya aktivitas HT yang paling menonjol adalah aktivitas menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan ummat dalam semua aspek, baik menyangkut cara penguasa tersebut mengurus kemaslahatan, seperti pembangunan jembatan, pendirian rumah sakit, atau cara melaksanakan aktivitas yang menyebabkan penguasa tersebut mampu melaksanakan (urusan ummat) seperti pembentukan kementerian dan pemilihan wakil rakyat. Yang dimaksud dengan penguasa di sini adalah Pemerintah.” Kemudian Taqiyyuddin melanjutkan: “Oleh karena itu, kelompok berkuasa tadi seluruhnya harus diserang, baik menyangkut tindakan maupun pemikiran politiknya.”<sup>41</sup>

Untuk itulah HT sering membuat surat kepada penguasa namun disebarluaskan secara umum (Surat Terbuka) yang isinya sebetulnya bukan semata-mata untuk menasehati penguasa namun juga agar masyarakat tahu keburukan-keburukan penguasanya. HT juga kerap melakukan demonstrasi bukan semata-mata untuk menasehati penguasa namun juga agar masyarakat tahu keburukan penguasa.<sup>42</sup>

Terdapat satu poin penting yang perlu juga untuk dicermati, Semangat yang digaungkan HT tentang pendirian negara Islam pada kenyataan tidak saja dimiliki oleh kelompok ini. terdapat banyak sekali kelompok di luar sana yang menginginkan hukum-hukum Allah diterapkan dalam ketatanegaraan. Jika kelompok-kelompok ini –termasuk HT- bertemu, maka sangat mungkin perang kepentingan kelompok akan terjadi. Di era reformasi kini, ada kalangan yang menuntut daerah otonomi khusus dengan ciri pelaksanaan syariat Islam. Kalau dicermati dengan seksama, kelompok yang menyatakan diri akan menegakkan syariat Islam adalah orang-orang tertentu di kalangan

---

<sup>41</sup> Al-Nabhani, *Terjun ke Masyarakat*, Terj. Abu Falah (Jakarta, Pustaka Thariqul ‘Izzah, Cetakan I, Syawal 1420 H, Pebruari 2000 M), hlm. 8 dan 9.

<sup>42</sup> Komunitas mantan Hizbut Tahrir, ‘Metode Dakwah Hizbut Tahrir; Meluruskan Metode Dakwah Hizbut Tahrir’. <http://mantanht.wordpress.com/feed/3> agustus 2008.

aktivis Islam yang belum berada pada posisi kekuasaan. Syariat Islam yang mereka maksudkan adalah Islam sebagaimana yang mereka pahami. Dengan demikian, bila mereka berkuasa, Islam sebagaimana yang mereka pahami itulah yang akan ditegakkan, dengan menggunakan kekuasaan politik yang sudah diraih.<sup>43</sup>

Hal di atas penulis yakini akan menjadi rintangan yang harus dihadapi oleh para aktivis HT. Namun perlu juga untuk diingat bahwa, justru dengan semakin banyaknya tantangan dan halangan inilah, militansi suatu gerakan akan semakin kuat.<sup>44</sup>

### **G. *Khilafah*: Tangan Panjang Tuhan?**

Khalifah merupakan sebutan yang ditujukan kepada kepala negara, pada awalnya, kepala negara biasa pula disebut dengan istilah Amirul Mu'minin, Imam atau Sultan. Pengangkatan seorang khalifah hanya dapat dilakukan dengan cara bai'at. Seorang khalifah kadang di bai'at secara langsung dan ia mewariskannya kepada yang lain di luar kerabatnya. Akan tetapi, pewarisan ini bukanlah satu-satunya yang menjadikan seorang sebagai khalifah. Orang yang bersangkutan akan mengambil bai'at saat ia akan menguasai *khilafah*.<sup>45</sup> Meski sering dicurigai bahwa khalifah dapat melakukan hal-hal yang disukainya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan bersama, tetapi ia bukanlah diktator, melainkan seorang pemimpin terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum muslim, yang secara ikhlas memberikannya berdasarkan kontrak politik yang khas, yaitu *bai'at*. Tanpa *bai'at*, seseorang tidak dapat menjadi kepala negara. Ini sangat berbeda dengan konsep raja atau diktator, yang menerapkan kekuasaan dengan cara paksa dan kekerasan. Contohnya dapat dilihat pada para raja dan diktator di dunia Islam saat ini, yang menahan, menyiksa kaum Muslim, dan menjarah kekayaan, serta sumber daya milik umat.

---

<sup>43</sup> M. Qasim Mathar, "Formalisasi Agama dalam Negara," disadur dari Seminar Sehari yang dilaksanakan oleh LK3 Banjarmasin Disampaikan di Banjarmasin 1 Oktober 2005. Komunitas Indonesia untuk Demokrasi.

<sup>44</sup> Sztompka bahkan menggambarkan bahwa gerakan sosial, dalam berbagai bentuk dan cita-cita yang diusungnya justru tumbuh pesat dan bahkan paling keras, berdarah, dan tragis justru terjadi di negara tirani. Dengan kata lain, semakin mendapat tekanan, gerakan sosial justru semakin kuat. Sztompka, *Sosiologi ...* hlm. 339.

<sup>45</sup> Al-Nabhani, *Daulah Islam*, hlm. 165.

Kontrak *bai'at* mengharuskan khalifah untuk bertindak adil dan memerintah rakyatnya berdasarkan syariat Islam. Ia tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat melegislasi hukum dari pendapatnya sendiri yang sesuai dengan kepentingan pribadi dan keluarganya. Setiap undang-undang yang hendak ia tetapkan haruslah berasal dari sumber hukum Islam, yang digali dengan metodologi yang terperinci, yaitu *ijtihad*. Apabila Khalifah menetapkan aturan yang bertentangan dengan sumber hukum Islam, atau melakukan tindakan opresif terhadap rakyatnya, maka pengadilan tertinggi dan paling berkuasa dalam sistem negara *khilafah*, yaitu *Mahkamah Mazhalim* dapat memberikan *impeachment* kepada khalifah dan menggantinya.<sup>46</sup>

Dalam proses pemilihannya, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa khalifah dipilih oleh rakyat secara keseluruhan atau mayoritasnya, baik secara langsung atau melalui perwakilan mereka (majelis umat/syuro), sebab dengan cara demikian legitimasi kekuasaan akan diperoleh. Sekilas memang tampak bahwa model ini sama dengan model demokrasi -yang selama ini ditolak mentah-mentah oleh HT, sebab menurut mereka sistem tersebut adalah sistem kufur-, tetapi nyatanya sistem ini berbeda. Perbedaannya, umat tidak berwenang mencabut kekuasaan khalifah sebagaimana dalam demokrasi.<sup>47</sup>

Terdapat sebuah lembaga yang memiliki kuasa untuk menurunkan khalifah, lembaga tersebut adalah *ahlul hall wal 'aqd*. Namun lembaga ini tidaklah sama persis dengan parlemen. *Ahlul hall wal 'aqd* hanya bertugas untuk menetapkan atau menurunkan khalifah (termasuk juga mengontrol khalifah), tidak lebih dari itu. Artinya, tatkala khalifah sudah terpilih dan ia sanggup berlaku adil maka *ahlul hall wal 'aqd* seolah-olah tidak diperlukan lagi. *Ahlul hall wal 'aqd* akan diperlukan lagi ketika khalifah tidak berlaku adil atau ketika khalifah perlu diturunkan. Jadi, institusi tertinggi adalah khilafah, namun pada suatu saat institusi tertinggi dapat diambil alih oleh *ahlul hall wal 'aqd*, yang pada dasarnya berarti diambil alih oleh rakyat. Adapun mengenai kekuasaan yudikatif, agaknya hampir setiap sistem negara (termasuk sistem Islam)

---

<sup>46</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, 'apa itu *khilafah*' Dalam, <http://hizbut-tahrir.or.id>. 21 Juni 2010.

<sup>47</sup> Adrisman, *Sistem negara khilafah, theokrasi dan demokrasi*. [www.rantau.net](http://www.rantau.net). 7 Maret 2004,



menempatkannya dalam posisi independen. Hal ini adalah niscaya karena hukum harus ditempatkan dalam posisi tertinggi, untuk menjamin keadilan bagi semuanya.<sup>48</sup>

Negara dengan sistem *khilafah* sebagaimana hal ini dicita-citakan oleh HT, diyakini sangat berbeda dengan sistem apapun yang ada saat ini, seperti demokrasi, teokrasi atau monarki. *Khilafah* akan melakukan rekonsiliasi antara seluruh umat Islam dan akan menghapus segala bentuk kesukuan dan kebangsaan. Negara *khilafah* bukan negara untuk faksi atau kelompok orang tertentu. *Khilafah* akan memandang seluruh warganegaranya, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, dengan pandangan yang sama. *Khilafah* akan menerapkan Islam sesuai dengan dalil-dalil terkuat dari sumber hukum Islam. *Khilafah* bukanlah negara untuk etnis atau ras tertentu. Setiap orang, apakah ia Arab atau non-Arab, putih atau hitam, memiliki kedudukan yang sama sebagai warganegara.<sup>49</sup> Dari sini tampaknya mulai jelas bahwa pendirian negara Islam berarti juga peleburan segala macam perbedaan ke dalam satu model aturan hidup saja, yakni Islam. Sebab sebagaimana hal ini telah diyakini, terdapat hanya satu aturan saja yang benar, yakni aturan yang bersumber dari Allah. Sementara aturan-aturan tersebut termanifestasi dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sang khalifah. Keyakinan yang selama ini berkembang adalah, khalifah memimpin negara berdasarkan perintah Allah SWT.<sup>50</sup>

Klaim bahwa khalifah yang memimpin berdasarkan perintah Allah SWT ternyata tidak jarang malah menjadi biang permasalahan yang timbul di kemudian hari. Bila ditelusuri dan pikirkan lebih mendalam, pada dasarnya, pada sistem khalifah terhadap persoalan yang mendasar dan problematis. Karena ia mengaku sebagai *Khalifatullah wa Rasul* (wakil Tuhan dan Rasulullah), maka banyak khalifah yang tidak merasa perlu atau penting mempertanggung-jawabkan kekuasaannya. Soalnya, ia menganggap bahwa apa saja yang dikatakan atau diperintahkan, itulah wujud dari hukum Tuhan. Dari sini, otoritarianisme dan absolutisme kekuasaan berawal, muncul dan menjadi tradisi yang dipelihara oleh banyak khalifah-khalifah di masa lalu. Padahal, sebagaimana tugas nabi

---

<sup>48</sup> 'Siyasah dalam pandangan Islam', dalam, <http://lukmanlatif.multiply.com/journal/item/2> 4 April 2009.

<sup>49</sup> Aridianto, *Sekilas tentang Negara Islam*. www.aridianto.blogspot.com. 8 Januari 2010.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 1.

sendiri, pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan dan memberikan bimbingan pada manusia seluruhnya. Selain itu, dalam sistem kekhalifahan, juga tidak ada pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>51</sup>

Jikapun ternyata cita-cita untuk mendirikan negara Islam ini terlaksana, belum dapat diputuskan di mana kira-kira kekhalifahan itu akan berpusat. Di Palestina –sebab di sana HT lahir-, di Indonesia -sebab memiliki pemeluk Islam terbanyak di dunia-, atau di tempat lain. Namun yang jelas, penulis meyakini bahwa setelah negara Islam berdiri pun, bukan berarti bahwa permasalahan akan berakhir. Sebab, bukankah dengan bersatunya seluruh negara yang ada di dunia ini merupakan lahan yang baru bagi berkembangnya masalah baru? Terutama perihal pusat pemerintahan, hal ini meliputi negara yang akan dijadikan sebagai ‘ibukota’ negara Islam, lalu anggota HT dari delegasi manakah yang akan menjadi khalifah, dan seterusnya. Yang jelas, pertarungan kepentingan tampaknya akan semakin meruncing.

## H. Simpulan

HT adalah satu dari sekian banyak gerakan Islam yang beraliran konservatif. Cita-cita untuk mengembalikan kegemilangan Islam di masa lalu merupakan agenda utama bagi kelompok ini, salah satunya adalah usaha untuk mendirikan negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah yang telah mendapat bai’at. Model kepemimpinan dalam ‘negara impian’ ini adalah kepemimpinan tunggal, sementara negara Islam adalah negara tanpa batas geografis. Khalifah yang dimaksud adalah seorang pemimpin negara Islam untuk seluruh dunia.

Adapun kesimpulan dari diskusi di atas terdiri dari dua hal: 1) kelompok ini telah menyebar ke berbagai wilayah dan telah menjangkau berbagai kalangan dengan berbagai macam latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Tokoh-tokohnya adalah Taqiyuddin al-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, Atha’ Abu Rasyah, sedangkan tokoh-tokoh perintis di Indonesia adalah Mama Abdullah Nuh, Abdurrahman al-Baghdadi, al-Khattath, dan Ismail Yusanto. 2) negara yang dicita-citakan HT adalah

---

<sup>51</sup> Ahmad Fuad Fanani, ‘Islam dan tantangan demokratisasi,’ dalam, *Opini* www.tokohindonesia.com, 8 Juli 2010.

negara dengan sistem *khilafah* yang melakukan rekonsiliasi antara seluruh umat Islam dan menghapus segala bentuk kesukuan dan kebangsaan.

### Daftar Pustaka

- Abegebriel, A. Maftuh dan Ibi Syatibi. “Fundamentalisme Islam, Akar Telogis dan Politis,” dalam *Negara Tuhan: Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Afdlal & Awani Irewat. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ahnaf, M. Iqbal. “MMI and HTI: The Image of the Other” dalam ed. Abegebreil, *Negara Tuhan, Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Al-Anshari, Mahmud. *Pengakuan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia*. Jakarta: Inisiasi Press, 2005.
- Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalis. Bogor: HT Press, 2002.
- Arifin, Syamsul. “Objektivikasi Agama sebagai Ideologi Gerakan Sosial Kelompok Fundamental Islam (Studi Kasus Hizb al-Tahrir di Kota Malang).” *Disertasi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia*. Malang: UMM Press, 2005.
- Basuki, Tobias. ‘Blasphemy Law, a Shackle to The Indonesian People’, dalam *The Jakarta Post*. 11 Februari 2010.
- Dawson, Catherine. *Practical Research Methods*. UK: Howtobooks, 2002.
- E. T, Zusiana & Masnun Tahir. *Terpinggirkan di Tengah Perjuangan: studi terhadap peran politik perempuan Hizbut Tahrir Indonesia*. [www.ditpertaiss.net/journal](http://www.ditpertaiss.net/journal).
- Efendi, Bachtiar. *(Re)Politisasi Islam*. Bandung: Mizan, 2003.
- Farouki, Suha Tahi. “Hizb al-Tahrir al-Islami” dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jilid 2, ed. John L. Esposito. Bandung: Mizan, 2001.
- Fuad, Abu dan Abu Raihan (ed.). *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Terj. Nurkholis. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Hartono, “Kontestasi Penerapan Syariat Islam Di Indonesia Dalam Perspektif HTI Dan MMI.” Tesis S2. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.
- Irewati, Awani, dkk. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Lipi Press, 2005.

- Ismail, Faisal. *Islam, Transformasi Sosial dan Kontinuitas Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Agama, Negara dan Penerapan Syariat*. Terj. Dr. Mujiburrahman, MA. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Karim. M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- Kodrat, Deni. “Dinamika Dakwah Hizbut Tahrir di Sejumlah Negara”, dalam *al-Wa’ie*, no. 55 tahun V. Maret, 2005, hlm. 75-81.
- Mathar, M. Qasim. *Formalisasi Agama dalam Negara*. Naskah bahan seminar, Banjarmasin 1 Oktober 2005. Komunitas Indonesia untuk Demokrasi.
- Moeloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1993
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Terjun ke Masyarakat*. Terj. Abu Falah. Jakarta: Pustaka Thariqul ‘Izzah, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Daulah Islam* Terj. Umar Faruq, dkk. Jakarta: HTI-Press, 2009.
- Nashir, Haedar. *Gerakan Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Psap, 2007.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan. Cet-V. 1998.
- Rahman, Fazlur. *Cita-Cita Islam*, Terj. Sufyanto dan Imam Musbikin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rahmat, Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Salim, Agus. “The Rise of Hizbut Tahrir in Indonesia 1982-2004.” Tesis S2, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Sudjito, Arie. ‘Kaum Muda dan Tantangan Perubahan Politik,’ dalam *Buletin Pusdep*. Vol. 4. November 2008.
- Suharto, Edi. Phd. *Islam dan Negara Kesejahteraan* –makalah disampaikan pada perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan mahasiswa Muhammadiyah tahun 2008. Di Jakarta, 18 Januari 2008.
- Zusiana, Elly. “Kepemimpinan Perempuan dalam *Khilafah*.” Tesis S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- Sztompka, Piötr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media Group. Cet-4. 2008.
- Tahrir, Hizbut. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*. Jakarta: Hizbut Tahrir, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Hizb Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Nasyrah Hizbut Tahrir*. Beirut, cetakan II, 1991.
- Tim Redaksi. "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin An Nabhani," dalam *al-Wai'e*, No. 55, Maret 2005.
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi (ed.). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.